

DINAMIKA PROSES PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG ANAK KALI CILIWUNG, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, JAKARTA UTARA

Zuraida

Mahasiswa Prodi Magister Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan,
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
e-mail: zuraida@mail.ugm.ac.id

Ahmad Sarwadi

Dosen Prodi Magister Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan,
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
e-mail: sarwadi@ugm.ac.id

ABSTRAK

Proses perbaikan permukiman kumuh di Kampung Anak Kali Ciliwung merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas lingkungan yang dilakukan secara bertahap melalui inisiatif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Transformasi tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, politik, dan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya memahami perbaikan permukiman tidak hanya sebagai intervensi fisik, tetapi sebagai proses sosial yang menghasilkan pembelajaran bagi praktik pembangunan. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika proses perbaikan kumuh dari praktik perbaikan permukiman kumuh yang dilakukan Komunitas Anak Kali Ciliwung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Kampung Anak Kali Ciliwung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dinamika proses penataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perbaikan berlangsung dalam tiga periode, yaitu penataan mandiri, penataan formal, dan pasca-proyek, dengan karakteristik aktor, tata laksana, partisipasi, dan capaian yang berbeda pada setiap fase. Analisis proses mengungkap pola hubungan yang saling terkait, di mana cara pelaksanaan memengaruhi kualitas partisipasi, sementara tingkat partisipasi berkorelasi dengan keberlanjutan hasil fisik dan ikatan sosial. Artikel ini menegaskan bahwa proses perbaikan permukiman perlu dipahami tidak hanya sebagai intervensi fisik semata, melainkan sebagai proses sosial dan politik yang dinamis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perbaikan Permukiman Kumuh, Kolaborasi, Partisipasi Masyarakat, Keberlanjutan

ABSTRACT

The slum upgrading process in Kampung Anak Kali Ciliwung represents a series of gradual efforts to improve environmental quality through community

initiatives and collaboration among various stakeholders. This transformation did not occur instantly but evolved through a long process shaped by various social, political, and institutional challenges. This condition highlights the need to understand slum upgrading not merely as a physical intervention, but as a social process that generates learning for development practices. This article aims to analyze the dynamics of the slum upgrading process based on the upgrading practices carried out by the Komunitas Anak Kali Ciliwung. The study employs a qualitative approach using a case study method in Kampung Anak Kali Ciliwung. Data were collected through interviews, observations, and document reviews, and then analyzed thematically to identify patterns in the dynamics of the upgrading process. The findings show that the upgrading process occurred in three phases, namely self-organized phase, formal phase, and post-project phase, each characterized by different actors, mechanisms, participation, and outcomes. The analysis reveals interconnected relationships in which implementation mechanisms influence the quality of participation, while the level of participation correlates with the sustainability of physical outcomes and social cohesion. This article emphasizes that slum upgrading should be understood not merely as a physical intervention, but as a dynamic and sustainable social and political process.

Keywords: *Slum Upgrading, Collaboration, Community Participation, Sustainability*

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh atau *slum* masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan. Tingginya tingkat urbanisasi dan daya dukung lingkungan perkotaan yang sudah tidak mampu lagi menanggung beban aktivitas yang terjadi di dalamnya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan terbentuknya permukiman kumuh atau *slum*. Permukiman informal di tengah perkotaan ini identik dengan kepadatan, kemiskinan dan kekumuhan atau lebih dikenal dengan 'kampung kota' (Yuliasari, 2020; Setiawan, 2010; Nugroho, 2009). Fenomena ini banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dimana pertumbuhan pola sosial dan budaya masyarakat berbeda dengan tuntutan kehidupan kota. Berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, sebanyak 445 (86%) rukun warga (RW) di Jakarta termasuk dalam kategori kumuh dan 15 (3,37%) RW di antaranya tergolong kumuh berat (Jakita, 2021). Area ini tersebar di sejumlah kampung kota, seperti Kampung Akuarium, Kampung Kunir, Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu dan sebagainya (Jakita, 2021). Berbagai program peningkatan kualitas permukiman kumuh telah dilakukan Pemerintah Jakarta mulai dari peningkatan infrastruktur dasar permukiman, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, hingga penataan kawasan. Pendekatan dan pola pelaksanaan program ini tidak selalu seragam di setiap lokasi, dan tidak selalu

berhasil mengatasi permasalahan kampung kota. Untuk itu, intervensi tersebut perlu dilihat secara spesifik, guna menjelaskan bagaimana proses tersebut dilakukan dalam konteks lokal, seperti yang terjadi di Kampung Anak Kali Ciliwung.

Wajah permukiman di bantaran Kali Ciliwung yang terbentuk saat ini merupakan hasil dari proses penataan yang dilakukan secara bertahap melalui inisiatif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Proses tersebut berawal dari upaya warga untuk merespons ancaman penggusuran dan berkembang menjadi perbaikan lingkungan menuju permukiman yang lebih layak. Aksi ini juga berhasil mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat yang telah lama tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini. Terlepas dari keberhasilan pelaksanaannya, masyarakat masih dihadapkan pada tahap yang tidak kalah penting dari proses perbaikan kawasan kumuh, yaitu memelihara dan mempertahankan hasil perbaikan. Artinya, proses perbaikan tersebut masih berlangsung dan akan terus berjalan selama masyarakat memanfaatkannya.

Kasus ini merupakan suatu peristiwa yang menarik karena model penataan mandiri ini tidak umum terjadi pada suatu kampung kota terutama di Jakarta yang saat itu lebih banyak menerapkan pola relokasi. Bahkan, dalam konteks perkotaan di Indonesia, fokus kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh saat ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pola permukiman kota (Nawasis, n.d.). Di tengah program-program penanganan kumuh yang diinisiasi pemerintah yang belum tentu berhasil, perbaikan kawasan kumuh yang diinisiasi dan dikerjakan oleh masyarakat secara mandiri ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih layak sesuai kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. Aksi kolektif ini juga memperoleh penghargaan tertinggi, yaitu medali emas dari Habitat Awards 2024 (Habitat, 2024). Peristiwa tidak umum ini memberikan peluang untuk melihat bagaimana dinamika interaksi antara aktor dan aktivitasnya mempengaruhi proses perbaikan dan keberlanjutan hasil perbaikan tersebut, sehingga keberhasilan maupun kegagalan pada siklus proses dapat menjadi pelajaran bagi proses penataan kumuh lainnya. Hal ini pula yang melatarbelakangi pengambilan kasus ini sebagai konteks untuk mengkaji persoalan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Studi mengenai praktik peningkatan kualitas permukiman kumuh (*slum upgrading*) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama pada kasus dari negara-negara berkembang di Afrika (Georgiadou & Loggia, 2024; Izar, 2022; Maganadisa et al., 2021; Mwamba & Peng, 2020; Parikh et al, 2020; Patel, 2013; Wainaina et al., 2022;). Namun, penelitian yang secara

husus menggali dinamika proses perbaikan permukiman kumuh yang diinisiasi secara mandiri dalam konteks Kampung Kota di Indonesia, masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan populasi dengan kasus perbaikan kumuh di Indonesia, khususnya dalam konteks kampung kota di kota metropolitan.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa setelah proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh berakhir, lingkungan cenderung mengalami penurunan kualitas, bahkan tidak terlihat jejak programnya (Werlin, 1999 dalam Hasanawi et al., 2019; Iqbal & Pramitasari, 2020; Sunarti et al., 2022). Terlepas dari berbagai capaian yang telah diraih hingga saat ini, proses perbaikan di Kampung Anak Kali Ciliwung masih dihadapkan pada tahapan yang tidak kalah penting, yaitu memelihara dan mempertahankan hasil perbaikan serta terus memperjuangkan keamanan bermukim. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan permukiman tidak hanya dapat memposisikan intervensi fisik sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai proses sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam penanganan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah, sering kali diletakkan intervensi fisik sebagai hasil akhir. Sementara itu, Turner melihat pembangunan perumahan dan lingkungannya, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai sebuah proses berkelanjutan yang tumbuh, berkembang, dan berevolusi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang, daripada sebagai sebuah objek atau produk jadi. Konsep Turner ini dikenal dengan konsep "*housing as a verb*" atau "perumahan sebagai kata kerja" yang menekankan pentingnya proses perumahan (Turner, 1976). Dalam hal ini, ia percaya bahwa kunci dari kawasan kumuh, adalah pertumbuhannya yang progresif, mondar-mandir dari waktu ke waktu. Konsep Turner ini dapat direpresentasikan oleh kampung-kampung yang ada di Indonesia, yang terus mengalami pertumbuhan, serta merepresentasikan konsep *housing autonomy*, di mana warga kampung mempunyai kebebasan dan otoritas untuk menentukan sendiri lingkungan kehidupan mereka (Turner and Fichter, 1972; Turner, 1976 dalam Setiawan, 2010; Turner, 2018 dalam Garrido, 2024).

Untuk menjelaskan proses perumahan, Turner mengadaptasi model sistem umum Patrick Geddes (1877) dan Bertalanffy (1948) yang disederhanakan menjadi proses perumahan yang spesifik yang dapat digambarkan sebagai interaksi antara orang-orang atau aktor dan produk mereka atau pencapaian melalui media peran dan tanggung jawab mereka atau kegiatan (Turner, 1976). Berdasarkan interaksi ini, dalam suatu proses perbaikan kawasan kumuh, capaian pada setiap tahapan dapat berbeda yang ditentukan oleh aktor dan aktivitasnya (Turner, 1972). Sejalan dengan pendapat tersebut, Choguill (1996) menunjukkan bahwa hasil inisiatif pembangunan, khususnya dalam peningkatan kondisi permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, sangat dipengaruhi oleh aktor yang

terlibat, khususnya sikap dan keterlibatan pemerintah serta partisipasi masyarakat yang mengontrol dan mengendalikan situasi. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian terhadap proses perbaikan di Kampung Anak Kali Ciliwung akan dikaji dalam perspektif suatu proses pembangunan yang terdiri dari aktor yang terlibat, peran aktor dan partisipasi masyarakat, tata pelaksanaan, serta capaiannya pada masing-masing tahap.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses perbaikan kumuh, dari praktik perbaikan permukiman kumuh yang dilakukan Komunitas Anak Kali Ciliwung. Dalam upaya membenahi permasalahan kumuh yang tengah dilakukan di Indonesia, penelitian ini menjadi penting dalam konteks mengevaluasi dan memahami proses perbaikan yang telah dilakukan dan diharapkan hasilnya dapat menjadi pembelajaran dan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program perbaikan permukiman kumuh, serta memberi rekomendasi tentang upaya mencegah terjadinya penurunan kualitas kawasan yang telah diperbaiki, atau dalam kata lain untuk menjaga agar keberlanjutan perbaikan tetap terus terjadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi sistem terikat nyata dan kontemporer (satu kasus) atau beberapa sistem terikat (beberapa kasus) dalam rentang waktu tertentu, melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi (misalnya, observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan) (Cresswell, 2013). Untuk menjelaskan peristiwa di Kampung Anak Kali Ciliwung, akan digunakan tipe studi kasus tunggal. Penelitian mengenai suatu proses perbaikan permukiman kumuh ini terdiri dari tahapan kegiatan perbaikan sebagai unit-unit analisis, sehingga penelitian ini termasuk ke dalam tipe *Embedded Single-Case Study*, atau studi kasus tunggal dengan beberapa unit analisis (Yin, 2018). Penelitian dilakukan di Kampung Tongkol (RT 07), Kampung Lodan (RT 04) dan Kampung Krapu (RT08) dalam satu kawasan permukiman yang dikenal dengan Kampung Anak Kali Ciliwung yang terletak di bantaran sungai Anak Kali Ciliwung di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada umumnya penelitian dengan pendekatan studi kasus mengungkap bagaimana kasus itu terjadi dan mengapa kasus itu terjadi. Pada riset ini membatasi pada bagaimana kasus itu terjadi, dalam hal ini adalah bagaimana proses perbaikan permukiman kumuh terjadi.

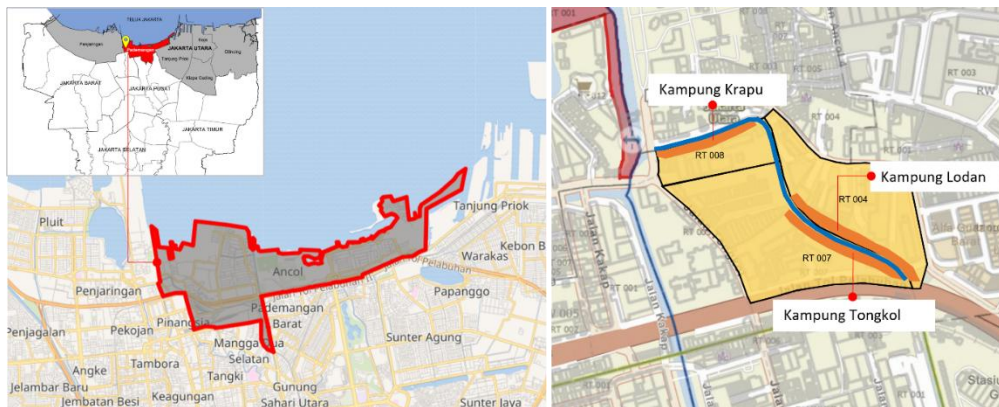
Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang mengadaptasi teknik analisis dari Creswell dan Yin. Pengumpulan data dilakukan pada Januari-Agustus 2025, melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci yang meliputi perwakilan komunitas, organisasi pendamping, serta pemerintah

daerah, dan dilengkapi dengan observasi lapangan serta studi dokumen. Seluruh data kemudian ditranskripsikan ke dalam teks dan visual dan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Analisis awal dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk matriks proses yang memuat tahapan kegiatan, aktor, peran aktor, tata cara, dan capaian untuk merekonstruksi alur proses pada masing-masing kegiatan. Selanjutnya, dilakukan analisis antar komponen pada tiap kegiatan (unit analisis) untuk melihat pola hubungan dari interaksi komponen, dan membandingkannya pada tiap fase. Hasil analisis akan diinterpretasikan terhadap teori dan penelitian terdahulu, dan direpresentasikan dalam bentuk narasi yang dilengkapi dengan gambar dan tabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kampung Anak Kali Ciliwung

Kampung Anak Kali Ciliwung merupakan kawasan permukiman yang terdiri dari tiga kampung, yaitu Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan Kampung Krapu yang membentang di kedua sisi anak Sungai Ciliwung. Kampung ini terletak di tengah-tengah dua pusat peradaban Kolonial. Di sebelah utara permukiman ini terdapat bekas pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi titik serang utama tentara Demak saat ingin membebaskan wilayah tersebut dari Portugis, sementara beberapa kilometer di selatan terdapat kawasan Kota Tua peninggalan kolonial Belanda (Irfansyah, et al., 2017).



Gambar. 1

Peta Lokasi Kampung Anak Kali Ciliwung

Sumber: Dimodifikasi dari Wikimapia dan Jakartasatu, 2025

Secara administratif, ketiga kampung ini berada di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Tahun 2022, Kampung Tongkol, Lodan dan Krapu tercatat sebagai zona perumahan dengan kepadatan sangat tinggi. Ketiga kampung berada dalam satu wilayah Rukun Warga (RW) yang sama, yaitu RW 01 dengan batas Rukun Tetangga (RT) yang berbeda. Kampung Tongkol

berada di wilayah RT 07, Kampung Lodan di RT 04, dan Kampung Krapu di RT 08. Penamaan Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan Kampung Krapu merujuk pada nama jalan utama yang melintasi masing-masing kampung, yaitu Jalan Tongkol, Jalan Lodan Raya, dan Jalan Krapu. Sebelum proses perbaikan, Kampung Lodan, Kampung Tongkol, dan Kampung Krapu merupakan tiga kampung kumuh dengan karakteristik tatahan bangunan yang tidak teratur dan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan, kurangnya infrastruktur dasar, dan perilaku masyarakatnya yang mencemari lingkungan.

4.2. Proses Perbaikan Permukiman Kumuh

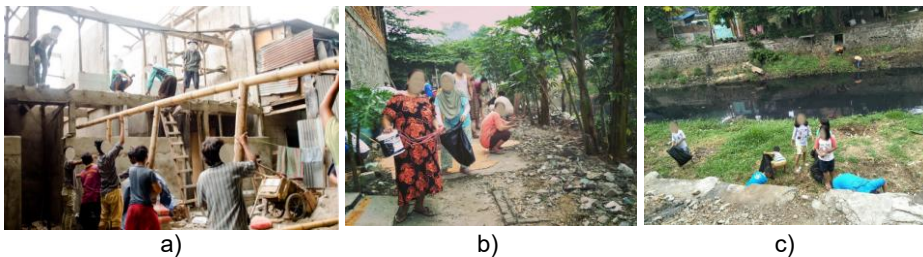
Proses perbaikan permukiman kumuh di kawasan Kampung Anak Kali Ciliwung berawal dari inisiatif masyarakat pada tahun 2015 sebagai respons terhadap ancaman penggusuran yang marak terjadi pada 2014-2015. Upaya awal dilakukan secara mandiri melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan non-pemerintah, tanpa intervensi langsung dari pemerintah daerah. Seiring perkembangan proses, inisiatif ini kemudian bertransformasi menjadi bentuk kolaborasi yang lebih luas yang turut melibatkan pemerintah daerah. Upaya penataan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga mencakup penguatan sosial, ekonomi, politis, serta perjuangan untuk memperoleh keamanan bermukim, yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini.

Secara kronologis, proses perbaikan permukiman kumuh di Kampung Anak Kali Ciliwung dilakukan dalam beberapa tahap, yang terdiri dari beberapa kegiatan yang berbeda. Masing-masing tahap terdiri dari komposisi aktor dan peran yang bervariasi, serta dilaksanakan dengan pendekatan yang relatif berbeda, yang menghasilkan beberapa karakter capaian dalam konteks waktu yang berbeda. Pergeseran komponen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan periode menjadi periode penataan mandiri (2015-2018), periode penataan formal (2018-2022), dan periode pasca-proyek (2019-sekarang).

4.3. Periode Penataan Mandiri (2015-2018)

Periode penataan mandiri ditandai dengan berbagai inisiasi penataan yang diprakarsai oleh masyarakat tanpa keterlibatan pemerintah. Komposisi aktor yang terlibat terdiri dari masyarakat, pendamping yang terdiri dari organisasi akar rumput (JRMK), NGO (UPC), akademisi, pakar/ profesional dan media (lokal dan internasional). Tanpa kehadiran pemerintah, masyarakat sebagai aktor utama menentukan sendiri rencana aksi perbaikan dan bagaimana berkolaborasi dengan aktor lain untuk mencapai tujuan kolektif komunitas. Komunitas bersama aktor pendamping berdiskusi untuk menentukan bagaimana peran didistribusikan dalam proses perbaikan, yang

diterjemahkan dalam berbagai kegiatan perbaikan fisik dan nonfisik. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri yang menyesuaikan dengan sumber daya yang terbatas. Kegiatan perbaikan fisik meliputi pemotongan bangunan untuk menyediakan jalan inspeksi, penataan ruang luar, penghijauan, pengelolaan sanitasi dan limbah domestik, pembangunan rumah contoh, serta pembersihan sungai. Kegiatan yang dilakukan pada periode ini tidak hanya terpaku pada perbaikan fisik yang bersifat jangka pendek, melainkan juga pada perubahan perilaku, penguatan sosial, ekonomi dan advokasi politik, yang berorientasi jangka panjang.



Gambar 2.

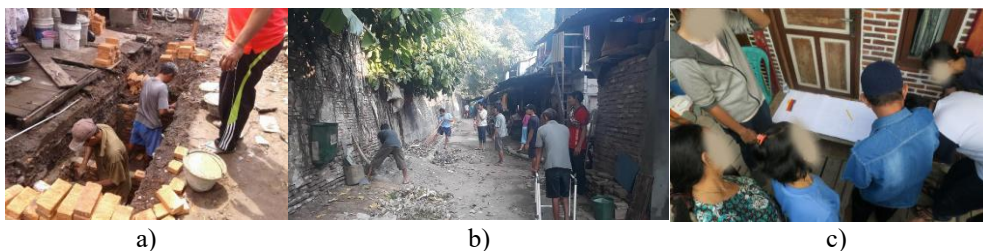
a) Pembangunan Rumah Contoh; b, c) Pembersihan Lingkungan

Sumber: Komunitas Anak Kali Ciliwung, 2016; ASF International, 2022

Pada fase ini, masyarakat berperan sebagai aktor utama yang terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan dan memiliki kontrol penuh terhadap keputusan. Pembagian peran dalam masyarakat menunjukkan pola partisipasi yang inklusif yang melibatkan seluruh lapisan warga kampung dengan porsi keterlibatan yang berbeda pada tiap tahapannya. Proses pelaksanaan kegiatan penataan fisik cenderung didominasi oleh warga laki-laki, terutama kalangan pemuda yang memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang tersebut. Meski demikian, para wanita juga ikut terlibat dalam kegiatan fisik tersebut, yang terwujud dalam keikutsertaan dalam diskusi perencanaan dan penyediaan dukungan logistik seperti makanan dan minuman bagi partisipan. Dalam proses perbaikan kampung, wanita mengambil peran spesifik dalam kegiatan penghijauan dan pengolahan sampah, meskipun kegiatan tersebut tidak berlanjut. Para wanita juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan membentuk kelompok tabungan untuk renovasi rumah. Selain itu, proses perbaikan juga melibatkan anak-anak. Pada pembangunan rumah contoh, anak-anak diajak untuk menggambar mural di salah satu dinding dan mengecat rumah bersama pemilik rumah. Selain itu, komunitas juga berkolaborasi dengan seniman seperti Ruang Rupa untuk mengajarkan kesenian dan keterampilan kepada anak-anak. Keterlibatan semua kelompok menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dirangkul dalam proses perbaikan kampung, sehingga tidak ada kelompok yang diasingkan.

Aktor dari akademisi (UI) dan pakar (ASF-ID), organisasi akar rumput (JRMK) dan NGO (UPC) berperan memberikan pendampingan kepada

masyarakat dalam berbagai kegiatan. UI dan ASF-ID secara spesifik berperan dalam memberikan pengetahuan teknis pelaksanaan perbaikan fisik bagi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pasca implementasi. Sementara itu, pendamping lainnya yaitu JRMK dan UPC juga bertukar pikiran dengan masyarakat, meningkatkan kapasitas warga dari sisi ekonomi, sosial-budaya, serta politik. Selain itu, para pendamping ini melatih warga agar dapat berkomunikasi dengan aktor lainnya untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi, sehingga tidak sekadar menjadi penerima informasi. Pendampingan dari UPC dan JRMK tidak hanya bertujuan menjembatani masyarakat dengan jaringan yang lebih luas, melainkan juga mendorong terbentuknya komunitas yang mandiri dan mampu mengorganisir diri. Kehadiran para pendamping ini tidak mendominasi inisiasi masyarakat, melainkan berfungsi sebagai stimulan yang mendorong partisipasi dan pengorganisasian masyarakat. Di samping aktor pendamping, aksi penataan mandiri ini juga menarik perhatian *stakeholder* yang lebih luas, terutama media lokal dan internasional untuk meliput kegiatan dan memberitakan aksi penataan (AA; DD; GM, Wawancara, 2025). Hal ini memberi eksposur bagi kampung, yang diyakini turut berperan dalam meredakan isu penggusuran di Kampung Anak Kali Ciliwung pada saat itu.



Gambar 3.
a) Pembangunan Tangki Septik Komunal; b) Persiapan Penataan Ruang Luar;
c) Pemetaan Ruang Luar

Sumber: Komunitas Anak Kali Ciliwung, 2017-2018; JRMK Jakarta, 2018

Karakteristik lain dari periode ini yaitu tata pelaksanaan rangkaian kegiatan melalui partisipasi kolektif yang adaptif dan inklusif. Tahap perencanaan dilakukan dengan cara yang dekat dengan keseharian warga seperti mengobrol, bercerita, serta diskusi interaktif, sementara pelaksanaan fisik dilakukan secara gotong royong oleh warga. Kegiatan dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu yang mengikuti ritme keseharian warga, yaitu pada sore dan malam hari yang merupakan waktu luang warga, serta dilaksanakan di ruang-ruang publik kampung seperti jalan kampung dan mushola. Pola pelaksanaan yang adaptif ini membuka kesempatan bagi seluruh lapisan warga untuk terlibat secara aktif pada seluruh tahapan proses dan menciptakan partisipasi yang inklusif, mendalam, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendamping. Pendekatan partisipatif tanpa batas ini juga mempererat hubungan sosial antar warga dan

pendamping. Partisipasi yang intens dan bermakna tersebut kemudian mendorong terbentuknya kontrol masyarakat, karena warga memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap proses. Partisipasi masyarakat pada fase ini tidak hanya sebatas hadir dan menerima informasi, tetapi juga menginisiasi kegiatan, ikut memberi ide, masukan, mengalokasikan dana, mengimplementasikan penataan fisik, dan menentukan rencana tindak lanjut kegiatan. Pendampingan dari aktor-aktor pendamping ini hanya bersifat teknis, yang mengungkit pengetahuan warga, menerjemahkan kebutuhan, memberi masukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Tabel 1.
Proses Perbaikan pada Periode Penataan Mandiri

Aktor	Peran/ Keterlibatan	Cara Pelaksanaan	Capaian
Masyarakat	Seluruh lapisan masyarakat terlibat dan memegang kontrol penuh terhadap kegiatan pada setiap tahap, mulai dari inisiasi, merencanakan, implementasi, hingga evaluasi	Pendekatan partisipatif kolektif yang adaptif terhadap ritme keseharian warga	- Capaian fisik terbatas - Desain kontekstual dengan seting kampung dan kondisi sosial-budaya warga
Organisasi Akar Rumput	Mengorganisir warga, meningkatkan kapasitas masyarakat (sosial, ekonomi, politik), menghubungkan ke <i>stakeholder</i> lain, serta turut memberi masukan (pemberdayaan masyarakat)		- Penguatan komunitas sebagai modal sosial
NGO	Mengorganisir warga, meningkatkan kapasitas masyarakat, menghubungkan ke <i>stakeholder</i> lain, dan memberi masukan (pemberdayaan masyarakat)		- Peningkatan kapasitas masyarakat - Peningkatan ikatan sosial antar warga dan pendamping;
Akademisi	Pendampingan teknis pada tiap tahap perbaikan, mentransfer pengetahuan guna meningkatkan kapasitas masyarakat, memberi masukan, serta turut menghubungkan ke jaringan aktor yang lebih luas (pemberdayaan dan pendampingan teknis arsitektural dan teknis pembangunan)		- Tercipta interaksi dengan lingkungan - Peningkatan eksposur kampung
Pakar/Profesional	Pendampingan teknis pada tahap perbaikan, mentransfer pengetahuan guna meningkatkan kapasitas masyarakat, memberi masukan, serta menghubungkan ke jaringan aktor yang lebih luas (pendampingan teknis)		- Terbuka akses ke pemerintah daerah

	arsitektural dan teknis pembangunan)
Media	Mendokumentasikan dan menyebarkan informasi secara masif

Sumber: Penulis, 2026

Keterbatasan sumber daya pada fase ini berimplikasi pada capaian fisik yang terbatas, namun partisipasi dan kontrol penuh dari masyarakat ini membentuk hasil penataan yang sesuai dengan proses sosial masyarakat sehari-hari dan kontekstual dengan kondisi fisik permukimannya. Hal ini terlihat pada konsep penataan Kampung Tongkol yang merespons keberadaan Sungai Ciliwung dan Tembok Tua Batavia, penataan ruang luar Kampung Lodan yang menjawab kebutuhan ruang servis hunian, dan perencanaan taman komunitas sebagai ruang penghubung Kampung Tongkol dan Krapu. Meskipun skala penataan fisik relatif kecil, dampak sosial yang dihasilkan pada periode ini semakin meningkat, yang ditandai dengan perubahan perilaku warga dan hubungan sosial antar warga kampung yang semakin erat. Berdasarkan informasi dari para informan (DD; IN; GM, Wawancara, 2025), sebelum melakukan aksi penataan mandiri, warga kampung tidak begitu mengenal satu sama lain, terlebih warga kampung lainnya, dan mulai saling mengenal karena ada isu penggusuran dan mulai kompak setelahnya. Ruang jalan yang terbuka sebagai hasil penyesuaian atau pemotongan bangunan berkembang menjadi ruang interaksi baru, yang berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya diskusi serta perumusan rencana aksi lanjutan. Rangkuman proses pada fase ini dapat dilihat pada Tabel 1.

4.4. Periode Penataan Formal (2018-2022)

Periode penataan formal ditandai oleh perubahan komposisi aktor, khususnya melalui keterlibatan pemerintah. Pada fase ini, proses perbaikan melibatkan masyarakat, pendamping —yang terdiri atas organisasi akar rumput, NGO, akademisi—, penyedia jasa, serta pemerintah daerah. Hadirnya pemerintah pada fase ini merupakan hasil dari advokasi politik pada proses penataan mandiri. Karakteristik kegiatan pada fase ini ditandai oleh pelaksanaan program pemerintah, yaitu *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP), dengan peran pemerintah yang lebih dominan. Keterlibatan pemerintah daerah ini menggeser peran aktor pada periode sebelumnya. Peran dalam memfasilitasi proses diskusi serta menerjemahkan aspirasi warga ke dalam desain pada fase ini diambil alih oleh konsultan. Sementara itu, para pendamping yang berperan pada fase sebelumnya tetap terlibat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terkait program sebelum konsultan masuk, memberikan masukan terhadap program, serta mengawasi pelaksanaan program dan realisasi kebijakan yang telah dijanjikan. Meskipun aktor-aktor kunci pada fase sebelumnya turut dilibatkan,

pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam menentukan penyedia jasa yang berperan sebagai perantara yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Dalam proses ini, peran penyedia jasa dan pemerintah daerah cukup dominan pada setiap tahapan, sementara keterlibatan masyarakat cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pemerintah daerah sebagai regulator juga memberikan legitimasi dan jaminan keamanan bermukim melalui penerbitan IMB Kolektif dan perubahan tata ruang menjadi zona permukiman (AA; AK; GM; MT, Wawancara, 2025).

Pola pelaksanaan yang dipakai pada fase ini yaitu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan (CAP). Tahap perencanaan pada fase ini juga dilakukan secara partisipatif, yang dilaksanakan dengan menyesuaikan waktu luang warga, yaitu pada malam hari. Namun, pelaksanaan cenderung diadakan di ruang formal seperti kantor kelurahan, kantor dinas, sehingga suasana diskusi cenderung lebih formal. Meskipun perencanaan melibatkan masyarakat dan rencana aksi dibuat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, keputusan akhir berada pada pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan pertimbangan teknis dan aturan. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan (CIP), pemerintah juga menunjuk pihak ketiga (kontraktor) sebagai pelaksana fisik, yang metode pelaksanaannya cenderung bersifat administratif, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung (AA; AK; GM; MT, Wawancara, 2025). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pada periode ini sangat terbatas, terutama pada tahap desain dan implementasi fisik, di mana desain akhir ditentukan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh penyedia jasa (kontraktor). Dengan kata lain, masyarakat tidak memiliki kontrol penuh terhadap keputusan sebagaimana yang terjadi pada periode penataan mandiri.



Gambar 4.

Hasil Penataan Formal a) Jembatan Penghubung; b) Plaza dan Jalur Pedestrian; c) Taman Vertikal; d-e) Jalan Lingkungan, Mural, RTH dan Drainase; f) Gapura

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Perbedaan dengan fase sebelumnya juga terlihat pada implementasi kegiatan yang lebih berfokus pada penataan fisik lingkungan. Peningkatan fisik meliputi penyediaan infrastruktur sungai seperti pembuatan turap (sheet pile), jembatan, plaza tepi sungai, dan jalur pedestrian. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman melalui pembangunan jalan inspeksi, gapura, ruang terbuka hijau, penyediaan drainase, tempat sampah, pembangunan tangki septik, serta mempercantik kampung dengan taman vertikal dan mural. Intervensi pemerintah ini menghasilkan perubahan fisik kampung yang cukup signifikan dan lebih masif daripada kondisi sebelumnya. Namun, minimnya keterlibatan dan kontrol masyarakat menghasilkan desain infrastruktur fisik yang cenderung seragam pada tiap kampung. Ruang-ruang baru yang dihasilkan dari proyek ini menciptakan interaksi baru antar warga dan dengan lingkungannya. Di sisi lain, partisipasi dan kontrol masyarakat yang terbatas pada fase ini diikuti oleh minimnya rasa memiliki terhadap proyek yang memberikan umpan balik bagi partisipasi pada fase selanjutnya. Proses pada tahapan ini dirangkum dalam Tabel 2.

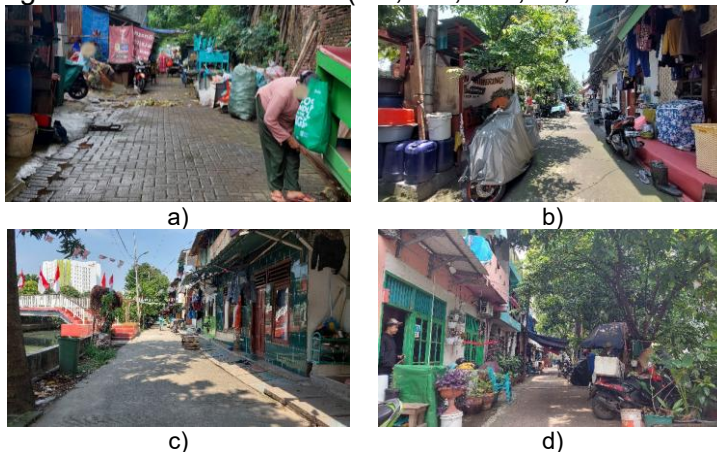
Tabel 2.
Proses Perbaikan pada Periode Penataan Formal

Aktor	Peran/ Keterlibatan	Cara Pelaksanaan	Capaian
Masyarakat	Masyarakat dilibatkan pada tahap perencanaan melalui perwakilan, namun keputusan tidak sepenuhnya dikontrol masyarakat. Pada tahap implementasi, masyarakat tidak terlibat	- Pendekatan bersifat demokratis pada tahap perencanaan, dengan suasana lebih formal	- Capaian fisik lebih masif - Desain cenderung seragam
Organisasi Akar Rumput	Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait program, memberi masukan bagi program, dan mengawasi pelaksanaan program/kebijakan (pemberdayaan masyarakat)	- Pendekatan lebih teknokratis pada tahap implementasi	- Terjalannya relasi dengan pemerintah daerah - Legitimasi dan keamanan bermukim
NGO	Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait program, memberi masukan bagi program, dan mengawasi pelaksanaan program/kebijakan (pemberdayaan masyarakat)		- Melemahnya partisipasi dalam proyek yang berdampak pada tidak terciptanya rasa memiliki
Akademisi	Memberikan masukan terhadap penyusunan program (teknikal arsitektural)		
Penyedia Jasa	- Konsultan sebagai perencana, fasilitator yang menerjemahkan kebutuhan warga dan perantara warga ke pemerintah - Kontraktor sebagai pelaksana pembangunan		
Pemerintah Daerah	Penyedia sumber daya dan regulator yang menentukan keputusan, kebijakan/program		

Sumber: Penulis, 2026

4.5. Periode Pasca-Proyek (2019-sekarang)

Setelah penataan formal berakhir, kerja sama warga dengan pemerintah daerah pada aspek infrastruktur permukiman berakhir, tanpa disertai mekanisme pemeliharaan. Pada periode ini, tidak terdapat pembangunan fisik baru yang dihasilkan. Seiring perubahan kondisi dan situasi, kegiatan lebih difokuskan pada pemeliharaan lingkungan, penguatan kelembagaan komunitas, serta perjuangan kolektif untuk memperoleh hak atas tanah. Periode ini juga menandai dimulainya pengelolaan dan pemeliharaan secara mandiri oleh masyarakat, di mana pembagian peran, bentuk kegiatan, dan pola pelaksanaan kembali ditentukan oleh komunitas melalui kesepakatan bersama. Pemeliharaan tersebut mencakup infrastruktur fisik yang dihasilkan baik dari penataan mandiri maupun penataan formal. Pemeliharaan dilakukan secara individual atas kesadaran masing-masing warga, yang diawasi oleh Ketua RT (AA; DD; GM; IN, Wawancara, 2025).



Gambar 5.

a) Perawatan Area Tembok Tua; b,c,d) Kondisi Fisik Pasca-Proyek

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Tanpa mekanisme pemeliharaan yang jelas, partisipasi dalam memelihara pun semakin menurun, yang menyebabkan menurunnya kualitas hasil penataan pada beberapa lokasi. Menurut GM, hal ini juga terjadi sebagai dampak dari minimnya partisipasi pada fase sebelumnya yang tidak menciptakan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun, sehingga upaya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan menjadi sangat terbatas (GM, Wawancara, 2025). Dengan fokus pemeliharaan yang dilakukan secara individual, kegiatan pemeliharaan kolektif seperti kerja bakti pun berkurang. Selain penurunan partisipasi dalam memelihara, fase ini juga menunjukkan penurunan partisipasi pada kegiatan sosial kolektif, yang diikuti oleh melemahnya ikatan sosial warga. Hal ini tercermin pada aktivitas koperasi yang sempat vakum, serta berkurangnya partisipasi warga pada pertemuan rutin JRMK. Oleh karena itu, JRMK mengadakan pertemuan rutin

untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan mendorong pembentukan kelompok kecil (kelompok 10) untuk menggerakkan kembali koperasi. Pada tahap ini, JRMK dan UPC juga memantau progres pengajuan hak atas tanah secara kolektif yang prosesnya sangat bergantung pada pemerintah daerah. Selain JRMK dan UPC, akademisi dari Universitas Indonesia juga masih terlibat sebagai pendamping teknis yang memberikan dukungan pada aspek arsitektural serta berbagai persoalan kampung yang belum terselesaikan, meskipun pada tahap ini tidak lagi berlangsung kegiatan perbaikan fisik. Para akademisi tersebut tetap berpartisipasi dalam berbagai pertemuan kampung sebagai bagian dari proses pendampingan yang berkelanjutan (GM; IN; MW, Wawancara, 2025). Dalam konteks ini, keterlibatan aktor pendamping sejak fase awal tidak hanya berperan dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pada saat proyek berlangsung, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan proses perbaikan kampung dan eksistensi kampung dalam jangka panjang. Konstruksi proses perbaikan pada fase ini dirangkum pada tabel 3.

Tabel 3.
Proses Perbaikan pada Periode Pasca-Proyek

Aktor	Peran/ Keterlibatan	Cara Pelaksanaan	Capaian
Masyarakat	- Masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki kontrol penuh terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan secara individual, dan sebagai penggerak koperasi secara kolektif. Ketua RT sebagai koordinator pemeliharaan secara kolektif dan penegak aturan	Pemeliharaan secara individual sementara pengajuan legalisasi lahan secara kolektif	- Hasil fisik mengalami penurunan kualitas di beberapa lokasi - Melemahnya partisipasi dan tanggung jawab dalam pemeliharaan - Menurunnya kegiatan sosial kolektif dan partisipasi dalam kegiatan sosial
Organisasi Akar Rumput (JRMK)	Pendamping teknis pengelolaan koperasi, penghubung ke aktor eksternal dan menjaga proses legalisasi lahan (pendamping teknis organisasional)		
NGO	Pendamping teknis pengelolaan koperasi, penghubung ke aktor eksternal dan menjaga proses legalisasi lahan (pendamping teknis organisasional)		
Akademisi	Pendamping Teknis bidang arsitektural dan teknis pembangunan		
Pemerintah Daerah	Regulator yang menentukan legalitas lahan		

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan penjelasan proses perbaikan pada setiap periode, analisis menunjukkan adanya perbedaan pada aktor, peran, cara pelaksanaan, serta capaian yang dihasilkan. Secara lebih rinci, persamaan dan perbedaan antarperiode tersebut dirangkum dalam Tabel 4. Pada komponen aktor, terlihat bahwa periode penataan mandiri didominasi oleh masyarakat yang berperan sebagai inisiator, konseptor, sekaligus pelaksana, dengan dukungan dari aktor pendamping nonpemerintah karena tidak adanya

keterlibatan pemerintah pada fase ini. Sementara itu, pada periode penataan formal, proses perbaikan lebih didominasi oleh pemerintah, dengan keterlibatan masyarakat yang relatif terbatas, terutama pada tahap implementasi fisik. Pada periode pasca-proyek, masyarakat kembali mendominasi sebagai pihak yang memanfaatkan dan memelihara hasil perbaikan, sementara peran pendamping bergeser dengan fokus yang lebih besar, yaitu pada upaya menjaga keberlanjutan proses perbaikan, khususnya melalui perjuangan legalitas lahan.

Dari sisi tata cara pelaksanaan, ketiga periode sama-sama menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, meskipun dengan tingkat dan karakter partisipasi yang berbeda. Pada periode penataan mandiri, partisipasi berlangsung secara kolektif dan adaptif dengan mengikuti ritme keseharian warga, sehingga keterlibatan masyarakat lebih luas dan bermakna. Sebaliknya, pada periode penataan formal, partisipasi masyarakat cenderung lebih terbatas karena proses dikendalikan oleh pemerintah melalui pendekatan gabungan *bottom-up* dan *top-down* yang melibatkan konsultan dan kontraktor. Berbeda dengan fase mandiri yang dilaksanakan secara kolektif, pola pelaksanaan pemeliharaan pada periode pasca-proyek cenderung berlangsung secara individual. Namun, kegiatan penguatan koperasi dan perjuangan legalitas lahan tetap dilakukan secara kolektif.

Tabel 4.
Penyandingan Proses Perbaikan Antar Periode

Komponen Analisis	Periode Penataan Mandiri	Periode Penataan Formal	Periode Pasca-Proyek
Aktor	Masyarakat dan pendamping (JRMK, NGO dan akademisi) sebagai aktor yang lebih dominan	Pemerintah sebagai aktor yang lebih dominan	Masyarakat sebagai aktor dominan
Peran/ Keterlibatan	Masyarakat sebagai aktor utama yang terlibat dalam setiap tahap, dengan bantuan para pendamping (JRMK, NGO, akademisi) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis arsitektural dan pembangunan	Pemerintah menentukan penyedia jasa, penyedia sumber dana dan pelaksana program	Masyarakat sebagai aktor utama yang memanfaatkan dan memelihara hasil penataan, sementara para pendamping berperan menjaga keberlanjutan proses perbaikan
Cara Pelaksanan	Partisipatif kolektif yang adaptif dengan ritme warga	Partisipatif dengan gabungan pendekatan <i>Bottom Up</i> dan <i>Top Down</i>	Partisipatif individual dan kolektif

Capaian	Capaian tidak hanya fisik, tetapi juga penguatan komunitas dan peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat mandiri	Capaian fisik masif namun partisipasi masyarakat menurun	Hasil fisik mengalami penurunan kualitas, serta penurunan partisipasi dalam memelihara dan dalam kegiatan kolektif
---------	---	--	--

Sumber: Penulis, 2026

Capaian yang dihasilkan pada setiap periode juga menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada periode penataan mandiri, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, capaian utama meliputi penguatan komunitas dan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak serta mampu mengelola kampungnya secara mandiri. Sementara itu, pada periode penataan formal, kegiatan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas fisik lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan fisik yang lebih masif. Namun, kondisi tersebut diikuti oleh menurunnya tingkat partisipasi masyarakat yang berdampak pada tidak terciptanya rasa memiliki terhadap hasil perbaikan. Pada periode pasca-proyek, sebagian hasil perbaikan fisik yang dicapai pada fase penataan formal mengalami penurunan kualitas di beberapa area akibat rendahnya rasa memiliki dan tanggung jawab dalam memelihara. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pada setiap periode tidak berhenti sebagai hasil akhir, melainkan turut memengaruhi perubahan komponen pada periode berikutnya. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan tersebut juga diiringi dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif komunitas, seperti pertemuan rutin JRMK.

4.6. Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan dinamika proses perbaikan permukiman di Kampung Anak Kali Ciliwung dari fase ke fase, yang terbentuk dari interaksi antar elemen proses. Dinamika ini menguatkan argumen Turner yang memandang permukiman kumuh sebagai sebuah proses, sehingga penataan permukiman kumuh di Kampung Anak Kali Ciliwung lebih tepat dipahami sebagai proses sosial, politis, dan berkelanjutan. Proses ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi terus dilakukan melalui interaksi sosial dan praktik keseharian yang dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan proses pengembangan sosial dan ekonomi warga kota (Turner, 2018 dalam Garrido, 2024; Turner & Fichter, 1972; Turner, 1976 dalam Setiawan, 2010).

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman konsep perumahan sebagai proses yang dikemukakan Turner. Dalam kerangka proses perumahan, Turner memandang proses perumahan sebagai hasil interaksi antara aktor dan pencapaian, melalui aktivitas yang dilakukannya. Turner juga

mengungkap bahwa kontrol dari penghuni menentukan proses dan hasil. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kontrol itu diperoleh, yaitu melalui perantara tata pelaksanaan yang adaptif terhadap ritme kehidupan warga yang mendorong partisipasi yang lebih luas dan bermakna.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi bersifat dinamis, mulai dari kontrol penuh, hingga partisipasi dalam bentuk kerja sama, yang berubah mengikuti perubahan pola intervensi pada tiap fase. Temuan ini sejalan dengan pernyataan World Bank (2021), bahwa dalam proyek perbaikan permukiman, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dapat bervariasi, bergantung pada pola intervensi yang diterapkan dan bagaimana intervensi tersebut dirumuskan. Minimnya intervensi langsung pemerintah pada fase awal memungkinkan masyarakat membangun mekanisme kontrol sosial yang kuat, yang tercermin dari tingginya partisipasi warga dan mempererat ikatan sosial ketiga kampung. Sebaliknya, pada fase penataan formal, masyarakat tidak memiliki kontrol penuh. Bahkan pada tahap implementasi, kontrol pemerintah lebih kuat, sehingga partisipasi warga menurun hingga ke periode pasca proyek. Kondisi ini menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat yang bervariasi dari satu fase ke fase lainnya sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi komunitas, yang menghasilkan karakter capaian yang berbeda. Temuan ini membuktikan teori tingkatan partisipasi Choguill (1996), bahwa hasil pada proyek pembangunan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dapat berbeda, yang ditentukan oleh sikap pemerintah terhadap komunitas. Lebih lanjut, kasus ini juga membuktikan argumen Choguill, bahwa dengan perubahan kepemimpinan dan adanya mekanisme dukungan dari pemerintah, inisiatif mandiri dari komunitas pada fase penataan mandiri dapat mempengaruhi proses dan hasil penataan dan menciptakan pemberdayaan setelah fase penataan formal, meskipun hasil pemberdayaan belum maksimal. Perubahan sikap pemerintah pada periode penataan formal tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari proses negosiasi politik antara komunitas dan aktor politik selama fase penataan mandiri yang membuka akses masyarakat ke kebijakan formal. Secara khusus, penjelasan temuan tersebut memperjelas konsep partisipasi Choguill.

Perubahan tingkat partisipasi dan kontrol masyarakat juga berkorelasi dengan dampak sosial dan keberlanjutan proses. Penurunan peran dan kontrol masyarakat pada fase penataan formal berdampak pada kurangnya rasa kepemilikan yang menyebabkan penurunan partisipasi dalam memelihara hasil penataan pada fase selanjutnya. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perbaikan permukiman, di mana tingkat partisipasi yang tinggi dapat menciptakan rasa memiliki yang mendorong pemeliharaan dan capaian yang lebih berkelanjutan, serta penguatan solidaritas dan hubungan sosial (Doe et al., 2020; Mwamba & Peng, 2020; Sasongko et al., 2021; World Bank, 2021).

Selain itu, keterlibatan aktor pendamping secara kontinu sejak fase awal hingga pasca-proyek berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proses perbaikan dan eksistensi kampung. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mwamba & Peng (2020) pada kasus peningkatan kualitas permukiman di Ng'ombe, yang menunjukkan lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk oleh NGO tetap berperan secara berkelanjutan setelah proyek selesai untuk memastikan keberlanjutan hasil upgrading melalui pengorganisasian masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perbaikan permukiman kumuh di Kampung Anak Kali Ciliwung bukan merupakan intervensi satu kali, melainkan proses bertahap yang tidak hanya mencakup intervensi fisik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan politik. Proses ini dikelompokkan dalam tiga periode, yaitu periode penataan mandiri, periode penataan formal, dan pascaprojek, yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri, serta membentuk sebuah siklus yang saling melengkapi sesuai dengan konteks dan situasi pada masanya.

Secara teoritis, temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperkuat konsep perumahan sebagai sebuah proses (*housing as a verb*), yang dipengaruhi oleh kontrol dari aktor, di mana masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda. Situasi dan kondisi pada setiap periode membentuk dinamika pada aktor, peran, dan cara pelaksanaan yang pada akhirnya menghasilkan capaian yang sesuai dengan konteks masing-masing periode. Hasil penelitian ini sekaligus mendukung argumen Choguill yang menyatakan bahwa proses dan hasil perbaikan dipengaruhi oleh interaksi aktor yang terlibat di dalamnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan kolaborasi dan peran para *stakeholder* dalam proses perbaikan permukiman akan berkembang sesuai dengan konteks situasi dan kondisi pada setiap tahapan, termasuk di dalamnya, tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, proses perbaikan permukiman perlu mendorong keterlibatan para *stakeholder* secara kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi sebagai seting proses perbaikan permukiman. Selain itu, diperlukan program keberlanjutan seperti penguatan kelembagaan dan legalisasi kepemilikan lahan secara kolektif, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan permukiman dalam jangka panjang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Architecture Sans Frontieres International. (2022). *Challenging Practice: Essentials For The Social Production Of The Habitat* (2nd ed.). United Kingdom: Architecture Sans Frontieres International.
- Choguill, M. B. (1996). A Ladder of Community Participation for Underdeveloped Countries. *HABITAT INTL*, 20, No.3, 431-444.
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches Third Edition*. Los Angeles: SAGE.
- Doe, B., Peprah, C., & Chidziwisano, J. R. (2020). Sustainability of Slum Upgrading Interventions: Perception of Low-Income Households in Malawi and Ghana. *Cities*, 107, 1-15. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102946>
- Garrido, P. F., & Robles, I. M. (2024). From Barn Raising to Community Empowerment: The Legacy of Karl Linn and John Turner. *CIUDADES*, 1-21.
- Georgiadou, M. C., Gyamfi, D., Hirmer, S., & Loggia, C. (2024). A Dataset of Community Perspectives on Living Conditions and Disaster Risk Management in Informal Settlements: A Case Study in KwaZulu-Natal Province, South Africa. *Data in Brief*, Volume 52, 2024, 109847, 1-11. doi:[10.1016/j.dib.2023.109847](https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109847).
- Habitat, W. (2024). *Awards Winners: Housing Rights in Jakarta: Collective Action and Policy Advocacy*. Retrieved Maret 30, 2026, from world habitat: <https://world-habitat.org/awards/winners/housing-rights-in-jakarta-collective-action-and-policy-advocacy/>
- Hasanawi, A., Masturi, H., & Hasanawi, A. (2019). Improvement of Community Governance to Support Slum Upgrading Programs in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, III, 347-358. doi:<http://dx.doi.org/10.36574/jpp.v3i3.88>
- Iqbal, M. N., & Pramitasari, P. H. (2020). Jaringan Lintas Komunitas Menuju Pembangunan Partisipatif Berkelanjutan. *PAWON*, IV, 109-122.
- Irfansyah, A., Mariani, E., Zahrah, F., Muhammad, G. N., Setiawan, I., Fahriza, M. A., & Aziz, Y. (2017). *Kampung Kota Merekam Edisi 1: Sebuah Kolaborasi*. Jakarta.
- Izzar, P. (2022). Meanings of Self-Building: Incrementality, Emplacement, and Erasure in Dar es Salaam's Traditional Swahili Neighborhoods. *Urban Planning*, 7(1), 305-320. doi:<https://doi.org/10.17645/up.v7i1.4849>
- Jakita, T. (2021). *Menata Kampung Kota Jakarta*. Jakarta: Jakita edisi 11.
- JRMK Jakarta. (2018, Juli 29). *Pemetaan Kampung Tongkol Bersama Departemen Arsitektur FTUI [Foto]*. Retrieved April 26, 2026, from Facebook: <https://www.facebook.com/profile/100004332544575/search/?q=tongkol>

- Komunitas Anak Kali Ciliwung. (2015, November 21). *Koleksi Foto Komunitas Anak Kali Ciliwung [Foto]*. Retrieved Oktober 20, 2025, from Facebook:
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1674227529486378&set=pb.100027666925210.-2207520000&type=3>
- Komunitas Anak Kali Ciliwung. (2017, Maret 20). *Koleksi Foto Komunitas Anak Kali Ciliwung [Foto]*. Retrieved Oktober 20, 2025, from Facebook:
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1883621935213602&set=pb.100027666925210.-2207520000&type=3>
- Komunitas Anak Kali Ciliwung. (2017, April 4). *Koleksi Foto Komunitas Anak Kali Ciliwung [Foto]*. Retrieved Oktober 20, 2025, from Facebook:
<https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891531871089275&set=pb.100027666925210.-2207520000&type=3>
- Komunitas Anak Kali Ciliwung. (2018, Agustus 5). *Koleksi Foto Komunitas Anak Kali Ciliwung [Foto]*. Retrieved Oktober 20, 2025, from Facebook:
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2157461581162968&set=pb.100027666925210.-2207520000&type=3>
- Maganadisa, K., Letsoko, V., & Pretorius, O. (2021). Effectiveness of In Situ Upgrading in Improving the Quality of Life of Beneficiaries Living in Informal Settlements in South Africa . *REAL CORP*, 301-312.
- Mwamba, J. S., & Peng, Z. (2020). Analysis of Informal Urban Settlement Upgrading: The Case of Ng'ombe Slum Upgrading in Zambia. *Current Urban Studies*, 509-532.
- Nawasis. (n.d.). Retrieved from Perkim Pedia. Nawasis:
<https://www.nawasis.org/perkimpedia/wiki/peremajaan-permukiman-kumuh-di-indonesia/4>
- Nugroho, A. C. (2009). Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas dan Ruang Kota Berkelanjutan. *Jurnal Rekayasa*, Vol.13, No.3, Desember 2009, 209-218.
- Parikh, P., Bisaga, I., Loggia, C., Georgiadou, M. C., & Ojo-Aromokudu, J. (2020). Barriers and Opportunities for Participatory Environmental Upgrading: Case study of Havelock Informal Settlement, Durban. *City and Environment Interactions*, 2-15.
- Patel, K. (2013). A Successful Slum Upgrade in Durban: A Case of Formal Change and Informal Continuity. *Habitat International*, 211-217.
- Sasongko, I., Imaduddina, A. H., & Widodo, W. H. (2021). Perbaikan Lingkungan Kampung Kota Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang. *PAWON: Jurnal Arsitektur*, V (Nomor 01), 117-136. doi:<https://doi.org/10.36040/pawon.v5i1.3237>
- Setiawan, B. (2010). *Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Sunarti, S., Yuliasuti, N., Purwanto, A. A., & Putri, K. (2022). Sustainability of Slum Upgraded Area, Case of Mojosongo, Surakarta, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1111(1), 1-8. doi:doi:10.1088/1755-1315/1111/1/012037
- Turner, J. F. (1976). *Housing By People: Toward Autonomy in Building Environment*. New York: Pantheon Books.
- Turner, J. F. (1996). Tools for Building Community: An Examination of 13 Hypotheses. *HABITAT INTL*, 20, No. 3, 339-347.
- Turner, J. F., & Fitcher, R. (1972). *Freedom to Build : Dweller Control of the Housing Process*. New York: The Macmillan Company.
- Wainaina, G. K., Truffer, B., & Lüthi, C. (2022). The Role of Institutional Logics During Participation in Urban Processes and Projects: Insights from a Comparative Analysis of Upgrading Fifteen Informal Settlements in Kenya. *Cities*, 2-12.
- World Bank. (2021). *Guidance Note on Community Participation in Slum Upgrading*. Washington DC: World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Method Sixth Edition*. Los Angeles: SAGE.
- Yuliasari, I. (2020). Hakekat Arsitektur Kampung Kota Dalam Konteks Filosofis. *LAKAR Jurnal Arsitektur*, Volume 03 No 02 (2020), 118-124.